



***Perencanaan Program Kerja Perspektif Gender: Studi Kasus Bidang Pengolahan Hasil, Pasca Panen, Penyebaran Informasi dan Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan***

Fadilah Nurdin<sup>1</sup>, Daeva Mubarika Raisa<sup>1</sup>, Mirnatul Qinayah<sup>1</sup>, Ahfandi Ahmad<sup>1</sup>, Sitti Bulkis<sup>2</sup>,  
Rahmadanah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Sinjai

<sup>2</sup>Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin.

Email: fadilahnurdin@umsi.ac.id

---

Corresponding Author: Fadilah Nurdin, Universitas Muhammadiyah Sinjai, Email: fadilahnurdin@umsi.ac.id

---

**ABSTRAK**

*Dalam kedudukan sebagai subjek pembangunan pria dan wanita mempunyai peranan yang sama dalam merencanakan, melaksanakan dan memantau hasil pembangunan, namun ternyata dalam hal pelaksanaannya masih banyak terjadi kesenjangan-kesenjangan. Gender Analisis Pathway (GAP) merupakan alat untuk mengetahui kesenjangan gender dalam program-program pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan program kerja responsif gender dan menganalisis hubungan antara perencanaan dengan indikator kesetaraan dan keadilan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di Bidang Pengolahan Hasil, Pasca Panen, Penyebaran Informasi dan Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi bahasa/pernyataan Kebijakan/Program/Kegiatan dan Output masih netral gender yaitu belum menunjukkan adanya keberpihakan kepada laki-laki dan perempuan, tetapi pada saat pelaksanaan kegiatan sudah terlihat laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam kegiatan. Adanya kesenjangan dalam peran kontrol khususnya kegiatan yang melibatkan kelompok tani. Laki-laki/suami dianggap sudah mewakili posisi perempuan atau istrinya dalam berbagai kegiatan. Faktor sosial seperti perempuan kebanyakan diam di rumah menjadi ibu rumah tangga sehingga rasa malas mengikuti organisasi timbul dikalangan perempuan. Adapun faktor ekonomi ada sebagian ibu-ibu yang berdagang di rumahnya memungkinkan untuk tidak mengikuti kegiatan khususnya keterlibatan dalam kelompok tani.*

Kata kunci: *Gender Analisis Pathway, Perencanaan, Perspektif Gender; Program Kerja*

**ABSTRACT**

*In the position as subjects of development, men and women have the same role in planning, implementing and monitoring development outcomes, however, in practice, there are still many gaps. Gender Pathway Analysis (GAP) is a tool to determine gender gaps in development programs. This study aims to analyze the planning of gender responsive work programs and analyze the relationship between planning and indicators of gender equality and justice. This study uses a qualitative approach with research locations in the Field of Product Processing, Post Harvest, Information Dissemination and the Horticulture Sector of the Department of Food*

*Security, Food Crops and Horticulture, South Sulawesi Province. The results of the study indicate that in terms of language/policy statements/programs/activities and outputs are still gender neutral, that is, it has not shown any partiality to men and women, but at the time of implementation of the activities, it was seen that both men and women were involved in the activities. There is a gap in the control role, especially activities involving farmer groups. The man/husband is considered to have represented the position of the woman or his wife in various activities. Social factors such as women mostly stay at home being housewives so that women feel lazy to join organizations. As for economic factors, some women who trade in their homes allow them not to participate in activities, especially involvement in farmer groups.*

*Keywords: Gender Pathway Analysis; Planning; Gender Perspective; Work Program*

## PENDAHULUAN

Dalam era reformasi masih banyak kaum perempuan di Indonesia yang menghadapi berbagai persoalan seperti sulitnya untuk memperoleh akses terhadap sumber daya pembangunan, kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta masih adanya kesenjangan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam bidang politik, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Perempuan adalah sasaran utama yang akan terkena dampak apabila sebuah kebijakan pemerintah diterapkan. Banyak perempuan yang memiliki hak dan aspirasi yang perlu diterjemahkan kedalam regulasi, ketimpangan dalam sosial politik menyebabkan regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh daerah di Indonesia banyak yang bersifat diskriminasi gender. Hal itu disebabkan karena kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan belum memperhatikan lebih dahulu dampak bagi perempuan sebagai anggota masyarakat yang dinilai sebagai kaum yang lemah (Valensia, 2015).

Dari tahun ke tahun upah yang diterima pekerja perempuan selalu lebih rendah dibandingkan upah yang diterima laki-laki. Salah satunya disebabkan karena perempuan dianggap bukan kepala keluarga sehingga diberikan gaji sebagai pekerja lajang. Berdasarkan data pada tahun 2015, rata-rata upah pekerja perempuan sebesar 1.68 juta rupiah sedangkan rata-rata upah pekerja laki-laki sebesar 1.94 juta rupiah. Namun demikian, kesenjangan upah antar gender cenderung menurun dan bahkan menurun tajam pada tahun 2015. Pada tahun 2014, kesenjangan upah gender sebesar 20.23 persen kemudian menurun hingga 13.83 persen pada tahun 2015. Walau kesenjangan upah gender terus menurun, rata-rata pekerja perempuan masih mendapatkan upah 13.83 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki (Statistik Gender Tematik, 2016).

Perencanaan responsif gender merupakan suatu upaya pengintegrasian aspek gender dalam proses penyusunan rencana untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender. Dalam perencanaan yang responsif gender, perencanaan dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2012).

Salah satu teknik yang bisa digunakan dalam penyusunan perencanaan responsif gender adalah teknik analisis model Gender Analysis Pathway (GAP). Gender Analysis Pathway (GAP) merupakan alat untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh perempuan dan laki-laki dalam program-program pembangunan. GAP dapat membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan atau program pembangunan, dengan GAP dapat diidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun rencana pembangunan yang responsif gender (Bappenas, 2007).

Penyusunan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan melalui pendekatan sinergitas perencanaan dari bawah dan kebijakan dari atas (Forum SKPD dan Musrenbang), serta pendekatan partisipatif, politis dan teknokratis. Dalam menyusun Renja senantiasa mempertimbangkan kondisi dan isu-isu strategis daerah khususnya pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Sulawesi Selatan dan juga isu-isu strategis nasional, serta arah kebijakan pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan, 2016).

Berdasarkan permasalahan tersebut Peneliti tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul "*Perencanaan Program Kerja Perspektif Gender*" untuk melihat sejauh mana program kerja responsif gender dengan melibatkan perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pembangunan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan bidang Pengolahan Hasil, Pasca Panen, Penyebaran Informasi dan Hortikultura. Teknik pengumpulan data dilakukan yaitu studi dokumen perencanaan dan wawancara mendalam dengan informan. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik Purposive. Adapun informan yang ditetapkan yaitu An Kepala/Staff Sub Bagian Program, Bidang Hortikultura, Bidang Pasca Panen, Pemasaran dan Penyebaran Informasi.

Untuk tujuan penelitian perencanaan program kerja, Analisis yang digunakan adalah analisis data deskriptif. Sedangkan mengenai hubungan perencanaan dengan indikator kesetaraan dan keadilan gender dianalisis dengan menggunakan teknik Gender Analisis Pathway (GAP). Gender Analisis Pathway (GAP) merupakan alat untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh perempuan dan laki-laki dalam program-program pembangunan. Adapun teknik Gender Analisis Pathway yaitu : 1. Identifikasi tujuan dan atau sasaran kebijakan atau program atau kegiatan atau sub kegiatan pembangunan yang akan dianalisis, 2. Sajikan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang terpilah menurut jenis kelamin sebagai data pembuka wawasan, 3. Lakukan analisis dalam memformulasikan kebijakan atau program kegiatan atau sub kegiatan dengan selalu mempertimbangkan keadilan gender, 4. Faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender, 5. Rumuskan kembali kebijakan/program/proyek/ kegiatan pembangunan baru yang responsif gender, 6. Identifikasi indikator gender, 7. Penyusunan rencana aksi, 8. Identifikasi sasaran-sasaran untuk setiap rencana aksi (Sumber : Panduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Analisis Perencanaan Program Kerja Dinas Pertanian*

Dalam setiap perencanaan kegiatan setiap bidang ada yang dinamakan dengan petunjuk teknis kegiatan dimana juknis tersebut berisi rencana kegiatan dan tata cara pelaksanaan setiap kegiatan. Sesuai dengan pendapat RPUK (2007), bahwa petunjuk teknis dibutuhkan untuk menjabarkan kebutuhan teknis bagi keterlibatan perempuan dalam pertemuan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Akan tetapi, dalam kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan tidak menargetkan apakah laki-laki atau perempuan yang terlibat, begitupun dengan jumlah peserta/pelaksana laki-laki dan perempuan yang harus dilibatkan dalam setiap kegiatan. Mereka yang dilibatkan sebagai peserta/pelaksana/penerima manfaat adalah orang-orang yang telah siap dan mampu menjalankan kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan setiap kegiatan. Data dan informasi terpilah berdasarkan jenis kelamin masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan karena tidak ada keharusan bagi setiap instansi untuk mengumpulkan data terpilah menurut jenis kelamin, apalagi digunakan untuk keperluan analisis. Data terpilah yang tersedia hanyalah data pegawai Dinas Pertanian karena persepsi bahwa data terpilah itu akan didapat dari Badan Pusat Statistik.

Menurut hasil wawancara dengan staf Sub Bagian Program Ibu Andi Ardha Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa :

*“Sudah ada aturan yang telah disampaikan di setiap bidang bahwa kegiatan harus memperhatikan keterlibatan kedua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan tapi kita tetap melihat apakah kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Seperti halnya pekerjaan yang membutuhkan tenaga ekstra contohnya bidang sarana dan prasarana yaitu kegiatan pengelolaan lahan dan air dimana laki-laki dianggap lebih mampu berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sama halnya dengan kegiatan seperti pengolahan hasil yang membutuhkan keterampilan dalam mengemas produk hasil pertanian, hasil pekerjaan perempuan dianggap lebih rapi. Walaupun pada kenyataannya beberapa kegiatan lebih didominasi oleh kaum laki-laki. Masih kuatnya persepsi bias gender dikalangan masyarakat bahwa yang menjadi pengurus inti kelompok tani adalah laki-laki, sedangkan perempuan hanya berperan dalam urusan rumah tangga.*

Aturan yang menyatakan bahwa setiap kegiatan harus melibatkan kedua jenis kelamin dibenarkan oleh staff bidang Hortikultura bahwa :

*“sudah disampaikannya adanya aturan tersebut tapi dikarenakan kebiasaan yang dilakukan setiap tahunnya mengakibatkan aturan lama yang diberlakukan”.*

Menurut Sub Bagian Program ibu Andi Ardha isu gender belum dianggap sebagai isu penting yang perlu ditangani secara serius oleh personil yang merencanakan program/kegiatan. Proses perencanaan program dan kegiatan melibatkan banyak individu termasuk di luar unitnya yang seringkali berada di luar wewenangnya.

**Hubungan Perencanaan dengan Indikator Kesetaraan dan Keadilan Gender**

Bidang Pengolahan Hasil, Pasca Panen dan Penyebaran Informasi  
 Analisis Kesenjangan Gender

Kegiatan	Akses		Partisipasi		Kontrol		Manfaat		Ket
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
Bimbingan teknis kelompok tani dan pelaku usaha komoditi tanaman pangan berpeluang ekspor	++	+	+++	-	+++	-	+++	-	(-) = tidak ada (+/-) = kecil (+) =ada (++) =banyak (+++)=banyak sekali
Pengembangan usaha agribisnis dan pembiayaan usahatani tanaman pangan dan hortikultura	++	+	+++	+	+++	+	+++	+	
Pelatihan peningkatan mutu produk olahan	++	+	+++	+	+++	+	+++	+	
Pertemuan kordinasi kegiatan PUAP	++	+	+++	+	+++	+	+++	+	
Apresiasi pembina dan petugas PUAP	+	++	+	+++	+	+++	+	+++	
Bimbingan teknis pengolahan hasil hortikultura	++	++	++	++	++	++	++	++	
Fasilitasi pelaku usaha pengolahan hasil hortikultura	++	+	++	+	++	+	++	+	
Revitalisasi dan fasilitasi agroindustri hortikultura	++	+	++	+	++	+	++	+	
Pengembangan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura	++	+	+++	+	+++	+	+++	+	
Pengembangan pemasaran serta penyebaran informasi tanaman pangan dan hortikultura	++	+	+++	+	+++	+	+++	+	
Pengembangan usaha agribisnis dan pembiayaan usaha tani tanaman pangan dan hortikultura	++	+	++	+	++	+	++	+	

Bidang Hortikultura  
Analisis Kesenjangan Gender

Kegiatan	Akses		Partisipasi		Kontrol		Manfaat		Ket
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
Peningkatan kapabilitas petugas dan pelaku usaha pada kebun agrowisata	++	+	+++	+	+++	+	+++	+	(-) = tidak ada (+/-) = kecil (+) = ada (++) = banyak (+++ ) = banyak sekali
Pembinaan pengembangan tanaman buah dan florikultura	++	+	+++	+	+++	+	+++	+	
Pengadaan sarana dan prasarana budidaya	++	+	+++	+	+++	+	+++	+	
Pengembangan kawasan tanaman sayuran	++	+	+++	+	+++	+	+++	+	
Sarana prasarana pasca panen sayuran dan tanaman obat	++	+	+++	+	+++	+	+++	+	
Perbanyak benih dan pengembangan kelembagaan perbenihan hortikultura	++	+	+++	+	+++	+	+++	+	
Peningkatan produksi dan mutu serta pengembangan tanaman hias	++	++	++	+++	++	+++	++	+++	
Peningkatan produksi dan mutu serta pengembangan sayuran dan biofarmaka	++	+	++	+	++	+	++	+	
Peningkatan produksi dan mutu serta pengembangan buah-buahan	++	+	++	+	++	+	++	+	

Adanya kesenjangan dalam peran kontrol khususnya kegiatan yang melibatkan kelompok tani. Keterlibatan perempuan dalam kepengurusan anggota kelompok tani harus lebih diperhatikan. Karena ini merupakan kendala utama perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang tentunya melibatkan kelompok tani. Faktor sosial seperti perempuan kebanyakan diam di rumah menjadi ibu rumah tangga sehingga rasa malas mengikuti organisasi timbul dikalangan perempuan. Adapun faktor ekonomi ada sebagian ibu-ibu yang berdagang dirumahnya memungkinkan untuk tidak mengikuti kegiatan khususnya keterlibatan dalam kelompok tani. Laki-laki/suami dianggap sudah mewakili posisi perempuan atau istrinya dalam berbagai kegiatan.

Dari hasil analisis terlihat bahwa program kerja harus lebih memperhatikan aspek gender, yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat laki-laki dan perempuan.

- a. Akses : Hal pertama yang harus dilakukan jika ingin menyusun program atau kegiatan supaya berkeadilan gender, adalah memberikan akses yang terbuka kepada semua unsur peserta termasuk kaum perempuan dan laki-laki. Bentuknya bisa berupa sosialisasi dan undangan. Para perencana dan pengambil keputusan belum mempertimbangkan bagaimana memperoleh kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk setiap sumber daya. Di mana perlu tersedianya informasi yang akurat untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai sasaran yang akan

diwujudkan/persoalan yang dihadapi, tersedianya informasi yang dapat diakses dengan mudah, murah dan dapat dimengerti atau dipahami dengan mudah, tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan dan kemudahan untuk mencapai sarana dan prasarana tersebut. Perlu ditumbuhkan budaya kebersamaan antara perempuan dan laki-laki untuk mengatasi bersama atas berbagai persoalan yang dihadapi. Selain itu perlu diusahakan berangsur-angsur meniadakan tradisi/kebiasaan yang dapat merugikan perempuan tanpa mengesampingkan kearifan lokal.

- b. Partisipasi : Belum memperhatikan apakah perencanaan memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam setiap kebijakan dan program pembangunan, antara lain untuk menentukan proses pemecahan persoalan/solusi yang dihadapi, turut serta dalam pengambilan keputusan baik terkait dengan jumlah maupun kualitas.
- c. Kontrol : Belum memperhatikan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Keberdayaan yang setara perempuan dan laki-laki dalam menggunakan haknya dengan berdaya guna dan berhasil guna, keberdayaan masyarakat dan institusi untuk mewujudkan kesetaraan yang adil bagi perempuan dan laki-laki, adanya norma peraturan dalam perencanaan yang menjamin perwujudan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, terutama bagi perempuan-perempuan pedesaan dan perempuan kepala keluarga.
- d. Manfaat : Perencana belum memperhatikan bahwa kebijakan/program akan menghasilkan manfaat yang setara bagi yang sama dan adil dari hak yang dipenuhi, terutama dipenuhinya hak perempuan.

Tidak semua pengambil keputusan dan perencana pada SKPD memahami konsep kesetaraan dan keadilan gender. Serta belum adanya data terpilah laki dan perempuan pada setiap kegiatan maupun tentang permasalahan dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Issu gender belum dianggap sebagai isu penting yang perlu ditangani serius oleh personil yang merencanakan program/kegiatan. Masih ada anggapan kuat di masyarakat bahwa yang menjadi pengurus inti dalam kelompok tani adalah laki-laki (sebagai pencari nafkah utama) sedangkan perempuan hanya berperan dalam urusan rumah tangga (pencari nafkah tambahan).

#### KESIMPULAN

Dari sisi bahasa/pernyataan Kebijakan/Program/Kegiatan dan Output masih netral gender yaitu belum menunjukkan keberpihakan kepada laki-laki dan perempuan. Tetapi pada saat pelaksanaan kegiatan sudah terlihat laki-laki dan perempuan yang terlibat, begitupun dengan jumlah peserta/pelaksana laki-laki dan perempuan yang harus dilibatkan dalam setiap kegiatan. Walaupun kegiatan masih didominasi oleh kaum laki-laki apabila kegiatan melibatkan anggota kelompok tani. Adanya kesenjangan dalam peran kontrol khususnya kegiatan yang melibatkan kelompok tani. Berdasarkan persepsi Sub Bagian Program laki-laki/suami dianggap sudah mewakili posisi perempuan atau istrinya dalam berbagai kegiatan. Faktor sosial seperti perempuan kebanyakan diam di rumah menjadi ibu rumah tangga sehingga rasa malas mengikuti organisasi timbul dikalangan perempuan. Adapun faktor ekonomi ada sebagian ibu-ibu yang berdagang di rumahnya memungkinkan untuk tidak mengikuti.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. 2007. *Gender Analysis Pathway (GAP) Alat Analisis Gender Untuk Perencanaan Pembangunan*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2012. *Perencanaan Pembangunan Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah*.
- Sopannah. 2004. *Menyoal Anggaran Publik, Suara Korban, Edisi I*, Malang Corruption Watch (MCW) : Malang.
- Valensia, E. 2015. *Peran Bupati Dr. Hj. Widya Kandi Susanti, Mm Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Pada APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2011-2013*. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Diponegoro Semarang.